

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN 2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

2022

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur tak terhingga sepantasnya kita naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya terhadap setiap tahapan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Periode 2023 – 2026 sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat mesti dilakukan secara sistematis dan terencana maka pemerintah daerah lewat organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dimaksud disusun dengan tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan tentang perencanaan pembangunan dan sebagai bahan informasi target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur empat tahun kedepan. Hasilnya diharapkan agar dokumen renstra ini dapat menjadi dokumen yang mendasari diterbitkannya dokumen perencanaan tahunan baik RENJA / RKPD serta rencana kerja anggaran maupun dokumen lainnya.

Demikian renstra ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah mendukung penyusunan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026, disampaikan terimakasih.

Larantuka, Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Flores Timur,

Antonius Leli Raya, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
LAMPIRAN BUPATI	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi PD	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L	III-2
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-4
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BABVIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Aset/Inventaris Kantor Dinas Perikanan	II-7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	II-10
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	II-13
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	III-1
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementria Kelautan dan Perikanan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-2
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Dinas Perikanan	IV-1
Tabel 5.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra PD Kab.Flores Timur Tahun 2023-2026.....	I-2
Gambar 1.2 Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Serta Dokumen Penganggaran	I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Tahun 2021	II-5



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

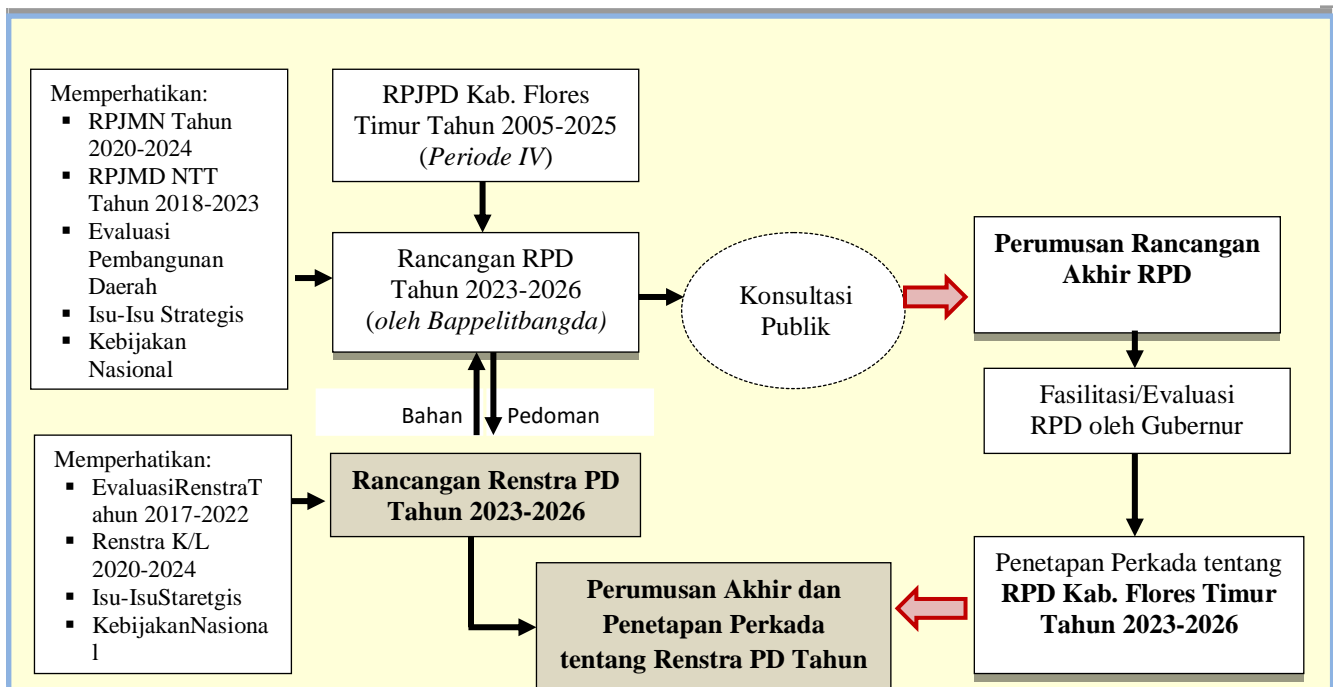
1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah. Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

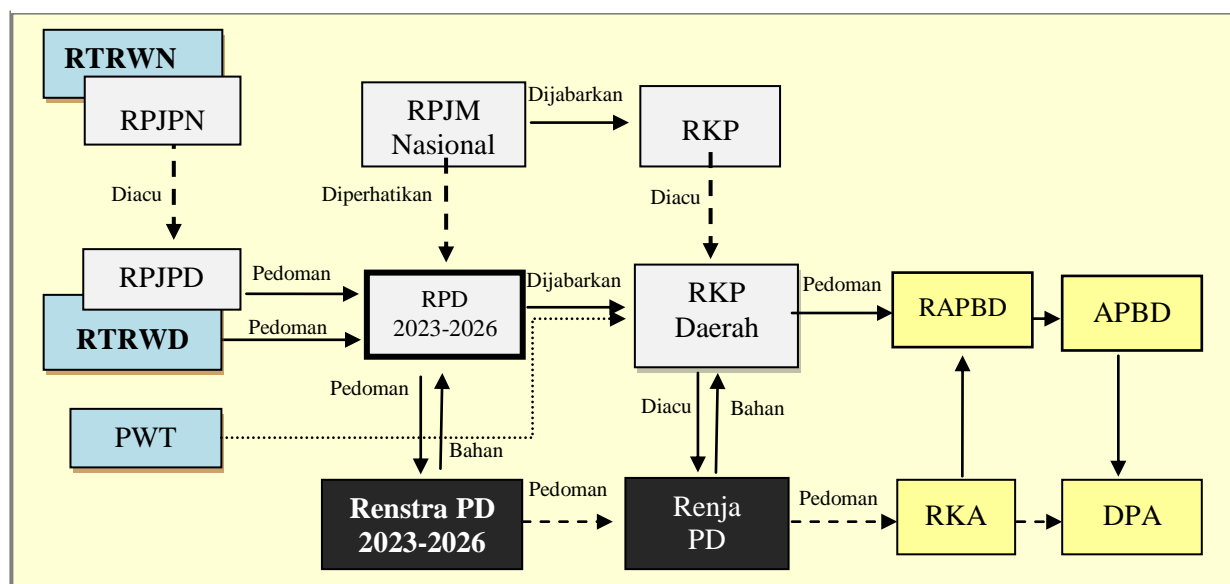
Gambar 1.1 .Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis).

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2. Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

12. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Perikanan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun kedepan.

2. Tujuan

- a. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya;

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Bab V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

Bab VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Bab VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur kemudian di jabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Salah satu tugas kepala Dinas Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan kelautan Kabupaten Flores Timur.

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Flores Timur di sektor perikanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di sektor perikanan
2. Pelaksanaan pembinaan operasional di sektor perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pengendalian dan pengawasan teknis di sektor perikanan
4. Pemberian bimbingan teknis di sektor perikanan
5. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya
6. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum di sektor perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 dan Perda Kabupaten Flores Timur nomor 76 tahun 2021 yakni sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

c. Bidang Perijinan Usaha dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

1. Seksi Perijinan
2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pangkalan Pendaratan Ikan
3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

d. Bidang Penguatan Kapasitas

1. Seksi Penguatan Nelayan Kecil
2. Seksi Penguatan Usaha Kecil dan Budidaya
3. Seksi Penguatan Kelembagaan

e. Bidang Perikanan Tangkap

1. Seksi Bina Nelayan Kecil
2. Seksi Kerjasama Kemitraan
3. Seksi Prasarana dan Sarana Tangkap

f. Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Perikanan

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan dan Sarana Prasarana Budidaya
2. Seksi Pengelolaan Air, Lahan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan, Pembenihan, Pembesaran dan Pelestarian Ikan

Uraian tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perikanan dan juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan perikanan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

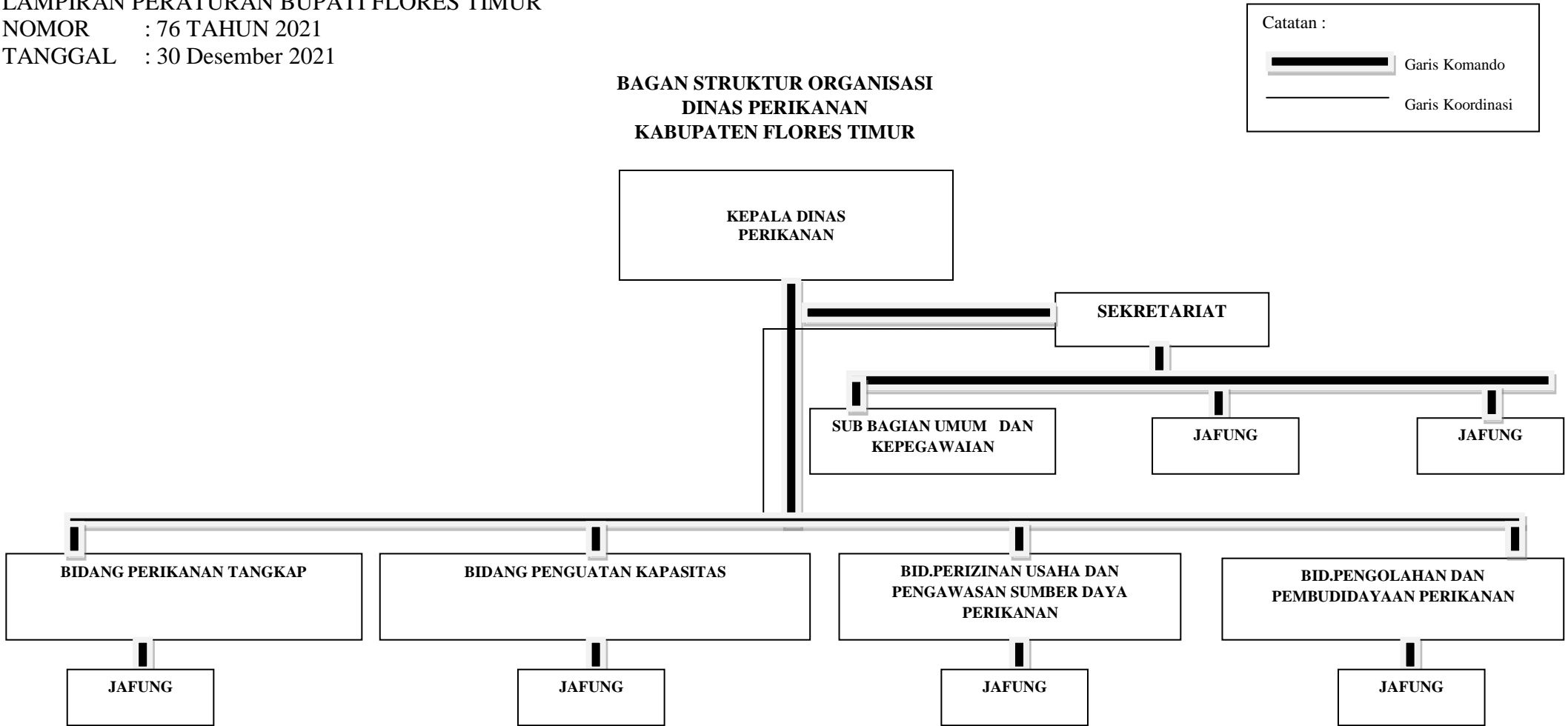
2. Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas serta menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan perikanan tangkap dan juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja perikanan tangkap;
 - b. Perumusan kebijakan teknis perikanan tangkap;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Penguatan Kapasitas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan penguatan kapasitas dan juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja penguatan kapasitas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis penguatan kapasitas;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan penguatan kapasitas;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penguatan kapasitas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perizinan Usaha dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan dibidang perizinan usaha dan pengawasan sumberdaya perikanan serta menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan;

- b. Perumusan kebijakan teknis perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perizinan usaha dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Perikanan** mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pembudidayaan perikanan serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja pengolahan dan pembudidayaan perikanan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pembudidayaan perikanan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pengolahan dan pembudidayaan perikanan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pembudidayaan perikanan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian dinas serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 8. Jabatan Fungsional** yang jenis dan jumlahnya di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 76 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang) PNS dan 71 (tujuh puluh) orang tenaga honorer (per Desember 2021), sebagai berikut :

1. Menurut Golongan :
 - Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 20 orang
 - Golongan II : 2 orang
2. Menurut Eselonering :
 - Eselon IIb : 1 orang
 - Eselon IIIa : 1 orang
 - Eselon IIIb : 4 orang
 - Eselon IVa : 15 orang
 - Fungsional umum : 5 orang
3. Menurut Jenis Kelamin :
 - Laki-laki : 16 Orang
 - Perempuan : 10 Orang
4. Menurut Tingkat Pendidikan:
 - Magister/S2 : 2 orang
 - Sarjana/S1 : 14 orang
 - D III : 3 orang
 - SLTA : 6 orang
 - SLTP : 1 orang
5. Tenaga honorer : 71 orang
 - Dinas : 34 orang
 - PPI : 35 orang
 - KPI Boru : 2 orang

Tabel 2.1

Kondisi Aset/Inventaris Kantor Dinas Perikanan

A. Inventaris Barang A

Tanah

Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500
Tanah Bangunan Gudang	8050
Tanah Bangunan Gudang	1020
Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	400
Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	10102

B. Inventaris Barang B

Peralatan dan Mesin

Nama Barang	Jumlah
Meja 1/2 Biro	19
Lemari Kayu	6
Kursi Kerja Pejabat lainnya	1
Mesin Kompresor	1
Peralatan Las Listrik	1
perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	1
Bor	1
Meja Rapat	4
Bak Cuci	1
Alat Pemadam Kebakaran lainnya	3
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12
Genset	1
Sepeda Motor	17
Lemari Kaca /Etalase	4
Cold Room Frezzer	1
Pick Up	1
Note Book	6
kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1
Meja Kerja Kayu	1
Kursi Tamu	2
Kursi Putar	5

A.C. Split	1
Cool Boox	1
Alat Pendingin lainnya	1
Kray/Gordyn	45
Kapal Patroli Laut	2
Buffet Kaca	1
Lap Top	3
Kursi Kayu	5
Mesin Pemotong Rumput	1
Lemari Es	1
A.C. Window	1
Camera Video	1
Rak Besi	2
Hand Metal Detector	1
Pelat Stainless Steel (304)	14
Gravity Roller Stainlless	3
Pisau Staainless untuk lairing	28
Asahan Pisau Bentuk Bulat	19
Asahan Pisau Bentuk oval	8
Timbangan digital (1,5 Kg)	2
Timbangan digital (6 Kg)	2
Timbangn digital (30 Kg)	2
Timbangn duduk digital Besar (150 Kg)	3
Troli Barang	2
Hend Driyer	4
High Presure Washer	1
Insect Kiler Lamps	3
Vacum Sealer	1
Starpping BandMachine	1
Pan ABF	349
Troli Es	1
Starpping BandMachine	1
Meja Tambahan	13
Kursi Rapat	8
Rak Sepatu (Almunium)	4
Pakain Kerja Pengolahan	50
Pakaian Kerja Cold Strage	4
Cololbox untuk tuna	7
Televisi	1
Locer Ruang Ganti Karyawan	3
Gantungn Baju Stenles	4
Living Room	1
P.C Unit	5
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5

C. Inventaris Barang C

Gedung dan Bangunan

Nama Barang	Luas (M2)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	247,50
Bangunan Pengisian BBM dan Depot Tangki Minyak	207,30
Bangunan TPI	226,80
Pabrik Es & Gudang & Pabrik Es & Genset Darurat	234
Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	45,40
Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	40,45
Gedung Pos Jaga Permanen	9
Bangunan Kolam Ikan	
Bangunan Kolam Ikan	
Bangunan Pos Pengawas	
Bangunan Pabrik Es	360
Bangunan Gedung Kantor Permanen	405
Waste Water Treatment	75

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, meliputi Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Urusan Kelautan dan Perikanan																
2	Penurunan kasus ilegal dan destructive fishing		15 kasus	13 kasus	10 kasus	10 kasus	7 kasus	6 kasus	0 kasus	10 kasus	0 kasus	0 kasus	60%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah biota laut yang dilindungi		10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pokmaswas		25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	25 pokmaswas	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah sarana prasarana pengawasan		1 unit kapal pengawasan	1 unit mobil pengawasan	2 unit kendaraan roda 2	2 unit kendaraan roda 2	2 unit kendaraan roda 2	1 unit kapal pengawas	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
6	Jumlah sarana prasarana penangkapan		6 jenis	10 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	7 jenis	7 jenis	10 jenis	9 jenis	8 jenis	116,17 %	70%	83%	75%	66,67%
7	Jumlah produksi tangkap		15.203 ton	15.328 ton	15.453 ton	15.578 ton	15.695 ton	15.230 ton	15.598 ton	15.832 ton	15.864 ton	15.900 ton (perkiraan)	100,17 %	101,76%	102,45%	101,84%	101,3% (perkiraan)
8	Jenis benih ikan unggul dan non ikan		2 jenis (tawar dan laut)	2 jenis tawar (tawar dan laut)	2 jenis tawar (tawar dan laut)	2 jenis (tawar dan laut)	2 jenis (tawar dan laut)	2 jenis (tawar dan laut)	0	1 jenis (tawar)	1 jenis (tawar)	1 jenis (tawar)	100%	0%	50%	50%	50%
			1 jenis (rumpu t laut)	1 jenis (rumpu t laut)	1 jenis (rumpu t laut)	1 jenis (rumpu t laut)	1 jenis (rumpu t laut)	1 jenis (rumpu t laut)	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%

9	Jumlah produksi budidaya (ikan dan non ikan)		295,6 ton	298,6 ton	301,6 ton	304, 6 ton	307,6 ton	231,17 ton	245 ton	156 ton	261 ton	261 ton (perkiraan)	78,4%	82,04%	51,72%	85,68%	84,85%
10	Jumlah pembakul ikan		500 kelompok	505 kelompok	510 kelompok	515 kelompok	520 kelompok	500 kelompok	505 kelompok	510 kelompok	515 kelompok	520 kelompok	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah pemasar dan pengepul ikan		41 kelompok	45 kelompok	50 kelompok	55 kelompok	60 kelompok	41 kelompok	45 kelompok	50 kelompok	55 kelompok	60 kelompok	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah kelompok pengolah ikan		34 kelompok	40 kelompok	45 kelompok	50 kelompok	55 kelompok	34 kelompok	40 kelompok	45 kelompok	50 kelompok	55 kelompok	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah kelompok perikanan budidaya		30 kelompok	35 kelompok	40 kelompok	45 kelompok	50 kelompok	30 kelompok	35 kelompok	40 kelompok	45 kelompok	50 kelompok	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah kelompok perikanan tangkap		80 kelompok	100 kelompok	120 kelompok	140 kelompok	160 kelompok	80 kelompok	100 kelompok	120 kelompok	140 kelompok	160 kelompok	100%	100%	100%	100%	100%
15	Frekuensi Pembinaan		10 kali	12 kali	14 kali	16 kali	18 kali	10 kali	12 kali	14 kali	16 kali	18 kali	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah sarana prasarana peningkatan mutu tangkapan dan olahan		2 jenis	1 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jenis Olahan		3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	3 jenis (ikan, non ikan, cangkang kerang)	100%	100%	100%	100%	100%
18	Peningkatan PAD untuk mendukung PDRB daerah sektor perikanan		980.800.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	983.800.000	1.100.000.000	645.986.321	1.263.000.000	653.639.200	100%	110%	65%	126%	65%
19	Peningkatan kualitas pelayanan publik		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur

Uraian	Anggaran					Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021 (unaudited)	2022 (per januari 2022 - undaudited)
Pendapatan	983.800.000	1.100.000.000	645.986.321	1.263.000.000	653.639.200	990.309.000	831.146.050	658.296.138	380.822.352	-
BTL	2.039.097.000	1.914.967.000	1.763.015.522	7.005.540.015	2.032.213.500	2.018.891.841	1.865.760.694	1.643.015.522	6.585.282.472	120.989.358
BL Rutin	934.999.225	1.126.059.500	841.199.225	976.821.217	771.649.535	899.387.361	1.094.568.536	765.082.250	615.663.223	-
BL Urusan Kelautan dan Perikanan	13.131.655.097	7.265.670.064	4.702.425.785	3.912.918.006	8.210.316.255	12.885.367.593	6.690.755.554	4.623.542.760	4.023.467.268	-

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	101	76	102	30	-	4,45	(44,75)
BTL	99	97	93	94	6	53,09	45,78
BL Rutin	96	97	91	63	-	(2,44)	(31,98)
BL Urusan Kelautan dan Perikanan	98	92	98	103	-	3,27	32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas urusan kelautan dan perikanan belum secara signifikan berdampak pada peningkatan kualitas produktivitas dan pengelolaan hasil perikanan yang bermuara pada peningkatan daya saing ekonomi daerah. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang belum optimal
2. Pelembagaan kelompok nelayan, kelompok budidaya, kelompok pengolah hasil perikanan serta penyuluh yang belum memadai
3. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman yang masih rendah
4. Tingkat kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah
5. Pengelolaan hasil dan pasca panen yang belum memadai
6. Kualitas produksi yang rendah
7. Peta potensi wilayah kawasan perikanan dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan yang belum tersedia
8. Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah yang masih kurang

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya dukungan daerah untuk peningkatan daya produktivitas sektor perikanan
2. SDM aparatur untuk pengelolaan perikanan tangkap, budidaya dan pengelolaan hasil perikanan tersedia
3. Perhatian dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, Tata kelola sumber daya kelautan dan serta Industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Proses penyiapan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Dinas Perikanan
Kabupaten Flores Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum tercapainya daya saing ekonomi	Rendahnya produksi dan produktivitas perikanan berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Belum optimalnya pelembagaan kelompok nelayan, kelompok budidaya, kelompok pengolah hasil perikanan serta penyuluh
		Belum tersedianya peta potensi wilayah kawasan perikanan dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan
		Masih rendahnya pengolahan hasil dan pasca panen
	1.Rendahnya kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah 2.Kurangnya pengembangan agroindustri	Belum optimalnya penguatan kelembagaan industry
		Rendahnya kualitas produksi
		Kurangnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi daerah sehingga penelaahan terhadap visi misi tidak ada, namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam rangka menjaga sinkronisasi dan sinergi implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur perlu melaksanakan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian renstra Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan	Ketersediaan dana yang terbatas untuk penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Adanya program untuk penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang bersumber dari DAK Penugasan dari KKP

2	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Belum optimalnya pelebagaan kelompok nelayan, kelompok budidaya, kelompok pengolah hasil perikanan serta penyuluh	Ketersediaan dana yang terbatas untuk penguatan kelembagaan	Tenaga SDM aparatur untuk penguatan kelembagaan yang tersedia pada Dinas Perikanan
3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Rendahnya proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Ketersediaan dana yang terbatas untuk pengawasan sumber daya perikanan	Adanya dorongan daerah dalam upaya menjaga lingkungan hidup
4	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	Rendahnya tingkat kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	Ketersediaan dana yang terbatas untuk pengawasan sumber daya perikanan	Adanya upaya daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
5	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Masih rendahnya pengelolaan hasil dan pasca panen	Ketersediaan dana yang terbatas untuk penguatan kelembagaan	Tersedianya tenaga SDM aparatur yang berkapasitas untuk penjaminan mutu hasil olahan perikanan pada Dinas Perikanan
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Rendahnya kualitas produksi	Belum mampunya kelompok pengolah hasil perikanan yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing	Adanya perhatian dari daerah untuk menghasilkan produk unggulan daerah
7	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Belum tersedianya peta potensi wilayah kawasan perikanan dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan	Keterbatasan dana untuk dilakukan kajian	Adanya perhatian dari daerah untuk menghasilkan pemetaan kawasan perikanan untuk pembangunan yang berkelanjutan
8	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Kurangnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Keterbatasan dana untuk promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Adanya dorongan masyarakat untuk meningkatkan nilai jual hasil perikanan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahana terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan gambaran tentang perbedaan antara kondisi saat ini dan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan
2. Belum optimalnya pelebagaan kelompok nelayan, kelompok budidaya, kelompok pengolah hasil perikanan serta penyuluh
3. Rendahnya proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
4. Rendahnya tingkat kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Masih rendahnya pengelolaan hasil dan pasca panen
6. Rendahnya kualitas produksi
7. Belum tersedianya peta potensi wilayah kawasan perikanan dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan
8. Kurangnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau mewujudkan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya daya saing ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan)	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan)	1,45	1,85	2,35	2,85	3,35	
	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (perikanan)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (perikanan)	0,33	1,25	1,75	2,15	2,94	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan) Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan)	Peningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Penguatan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya, pengolah hasil perikanan dan Penyuluh
			Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan
			Penyediaan sarana dan prasarana perikanan
			Pengolahan hasil (pasca panen) perikanan
	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan)	1. Meningkatkan kualitas produksi, promosi, dan pemasaran produk unggulan daerah 2. Pengembangan Agroindustri	Penguatan kelembagaan industri
			Peningkatan kualitas produksi
			Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Perikanan akan menjalankan 4 program untuk menjawab isu strategis dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Satuan)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Lokasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026				2023	2024	2025	2026	
								Kine rja	Anggaran	Kiner ja	Anggaran	Kine rja	Anggaran	Kine rja	Anggaran	Targ et	Rp					
x	xx	0 1			DINAS PERIKANAN				11.719.475.972		9.531.383.310		11.649.347.974		11.791.996.885		44.692.204.140					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pesentase Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	3.954.514.220	100	3.868.631.560	100	3.868.631.560	100	3.927.152.653	100	15.618.929.993	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	100		100		100		100		100	(0)					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	100		100		100		100		100						
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100		100		100		100		100						
X	X X	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	100	182.147.787	100	194.753.761	100	175.448.160	100	250.823.399	100	803.173.107	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

X	X X	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)</i>	2	2	60.000.000	2	39.770.880	2	24.933.523	2	60.233.620	8	184.938.023	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
X	X X	1	2. 01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)</i>	2	2	40.000.000	2	40.162.400	2	40.326.626	2	60.493.910	8	180.982.936	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
X	X X	1	2. 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	6	6	52.147.787	3	62.460.974	3	77.777.716	3	97.685.574	15	290.072.051	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	0 1	2. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	4	30.000.000	4	52.359.507	4	32.410.295	4	32.410.295	16	147.180.097	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
X	X X	1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaporan Keuangan (%)</i>	100	100	2.627.403.613	100	2.638.070.872	100	2.648.858.102	100	2.659.846.130	100	10.574.178.717	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
X	X X	1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	14	14	2.519.719.504	14	2.529.949.566	14	2.540.294.681	14	2.550.832.365	14	10.140.796.116	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
X	X X	1	2. 02	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		0	-	12	77.999.506	12	78.318.451	12	78.643.333	36	234.961.290	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

X	X X	1	2. 02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD(dokumen)	12	12	77.684.109						12	77.684.109	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan	
x	xx	0 1	2. 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD(Laporan))	2	2	30.000.000	2	30.121.800	2	30.244.970	2	30.370.432	8	120.737.202	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	0 1	2, 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	13	6	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	13	40.000.000	45	85.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	0 1	2, 03	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	1	0	-	1	2.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	3	10.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	0 1	2, 03	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	6	0	-	6	5.500.000	6	2.000.000	6	7.500.000	18	15.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	0 1	2, 03	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	6	6	15.000.000	6	7.500.000	6	10.000.000	6	35.000.000	24	67.500.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	0 1	2, 05		Adminstras Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	4	40.000.000	0	20.081.200	0	34.489.915	0	34.632.987	4	129.204.102	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah dokumen pendataan, pengolahan administrasi kepegawaian</i>	12	0	-	12	5.040.600	12	10.163.305	12	10.205.465	36	25.409.370	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	4	4	10.000.000							4	10.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)</i>	12	12	10.000.000	12	15.040.600	12	24.326.610	12	24.427.522	48	73.794.732	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	4	4	20.000.000							4	20.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	100	256.383.864	100	189.046.641	100	207.021.300	100	207.838.586	100	860.290.390	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	2	4	4.457.734	4	10.418.992	4	10.461.596	4	10.504.993	16	35.843.315	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah pajet peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Paket)</i>	2	2	26.622.580	2	10.000.000	2	40.891	2	41.060	8	36.704.531	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)</i>		0	-	1	1.734.728	1	2.938.200	1	2.942.388	3	7.615.316	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	25.136.669	1	30.279.324	1	30.403.138	1	30.529.257	4	116.348.388	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	14.859.115	2	8.919.443	2	8.955.915	2	8.993.066	8	41.727.539	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	2	2	1.362.086	2	1.367.616	2	1.373.208	2	1.378.904	8	5.481.813	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12	12	22.288.672	12	20.391.344	12	10.474.725	48	10.518.177	48	63.672.918	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	12	12	131.657.008	12	90.813.394	12	129.435.427	48	129.972.353	12	481.878.182	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)		0	-	1	5.121.800	1	2.938.200	2	2.958.388	3	11.018.388	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(dokumen)	1	0	30.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	60.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	7	14	76.500.863	8	51.527.256	8	51.553.946	8	51.581.134	38	231.163.199	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan(unit)	3	3	6.500.863	3	4.000.000	3	4.016.356	3	4.033.017	12	18.550.236	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan(Unit)	-	7	50.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	19	185.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud lainnya yang disediakan (unit)		0	-	1	2.527.256	1	2.537.590	1	2.548.117	3	7.612.963	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan(Unit)	4	4	20.000.000							4	20.000.000	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	100	573.149.782	100	575.476.769	100	577.829.928	100	580.226.890	100	2.306.683.370	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat (Laporan)	12	12	1.362.086	12	1.367.616	12	1.373.208	12	1.378.904	48	5.481.813	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	12	102.587.696	12	103.004.202	12	103.425.392	12	103.854.423	48	412.871.712	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12	12	469.200.000	12	471.104.952	12	473.031.328	12	474.993.563	48	1.888.329.844	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

x	xx	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	183.928.312	100	184.675.061	100	158.430.208	100	102.203.528	100	629.237.109	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		30	124.765.191	30	125.271.738	30	100.994.646	30	48.164.672	30	399.196.247	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	2	0	-	8	4.203.000	8	4.188.097	8	9.253.330	24	17.644.427	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	6	18.000.000	2	16.000.000	2	14.000.000	2	14.058.345	12	62.058.345	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	1	30.000.000	1	28.000.000	1	26.000.000	1	21.079.775	1	105.079.775	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	11.163.121	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.020.741	1	26.183.862	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan
x	xx	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	1	0	-	1	6.200.323	1	8.247.465	1	4.626.665	1	19.074.453	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Larantuka	Dinas Perikanan

3	25	3			PROGRAM PENGELOLA AN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pemuhan sarana dan prasarana(%)	0	38,19	5.895.765.460	38,96	3.728.943.030	39,73	5.843.089.295	40,5	5.867.327.675	0,405	21.335.125.460	Kabupaten Flores Timur	Kabupat en Flores Timur	Kabupat en Flores Timur	Kabupat en Flores Timur	Dinas Perikanan
3	25	3	2. 01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi ikan kontribusi hasil kelompok Nelayan(ton)	15.900	1600 0	4.777.941.019	16100	2.611.118.590	1620 0	4.725.264.855	1630 0	4.744.866.261	1630 0	16.859.190.725	Larantuka	Larantuk a	Larantuk a	Larantuk a	Dinas Perikanan
3	25	3	2. 01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	1	1	192.869.465	1	192.869.465	1	192.869.465	1	193.669.529	4	772.277.924	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Dinas Perikanan
3	25	3	2. 01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia(Unit)	973	1073	4.585.071.554	1173	2.418.249.125	1273	4.532.395.390	1373	4.551.196.732	1373	16.086.912.802	Laka, Patisirawal ang, Nobo, Pantai Oa, Waiula,Nur abelen (Mesin Ketinting), Waibalun, Lewolere, Mokantarak , Amagarapa ti, Sagu, Balaweling 1, Balaweling 2, Pantai Besar, Postoh, Amagarapa ti (Pancing Layur),	Laka, Patisiraw alang, Nobo, Pantai Oa, Waiula,N urabelen (Mesin Ketinting , Waibalun , Lewolere , Mokantar ak, Amagara pati, Sagu, Balaweli ng 1, Balaweli	Lohayon g 1, Lohayon g 2, Lewolaga , Laka, Ratulodo ng, Amagara pati, Postoh, Samasog e (Lampu celup), Sagu, Adonara, Laka, Tiwatobi, Bama, Ratulodo ng (Pancing Gurita),	Ratulodo ng, Lohayon g 1, Lohayon g 2, Lewolaga , Amagara pati, Postoh (Kelengk apan Bagan), Laka, Patisiraw alang, Nobo, Pantai Oa, Waiula, Nurabele n,	Dinas Perikanan

																	Ratulodong , Patisirawal ang, Konga, Sarotari Timur, Mokantarak , Lamahala Jaya (Kapal), Sagu, Adonara, Laka, Tiwatobi, Bama, ratulodong (Gillnet)	ng 2, Pantai Besar, Postoh, Amagara pati (Pancing Layur), Ratulodo ng, Patisiraw alang, Konga, Sarotari Timur, Mokantar ak, Lamahala Jaya (Kapal), Sagu, Adonara, Laka, Tiwatobi, Bama, ratulodon g (Gillnet)	Lamahala Jaya, Terong, Motonwu tun, Duanur (Jaring Purse Sein), Waibalun , Lewolere , Mokantar ak, Amagara pati, Sagu, Balaweli ng 1, Balaweli ng 2, Pantai Besar, Postoh, Amagara pati (Pancing Layur)	Waibalun (Fish Finder) Pantai Oa, Waiwuri ng, Mokantar ak, Adonara, Sagu, Balaweli ng 1, Balaweli ng 2, Pantai Besar (Gillnet), Bama, Postoh, Samasog e, Boleng, Dua Nur (Kapal)		
3	25	3	2. 03		Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan Tpi yang di kelola(layanan)	4	4	1.117.824.440	4	1.117.824.440	4	1.117.824.440	4	1.122.461.414	4	4.475.934.736	Amagarap ati	Amagar apati	Amagar apati	Amagar apati	Dinas Perikanan
3	25	3	2. 03	2	Pelayanan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	4	1.117.824.440	4	1.117.824.440	4	1.117.824.440	4	1.122.461.414	4	4.475.934.736	Amagarapa ti	Amagara pati	Amagara pati	Amagara pati	Dinas Perikanan
3	25	4			PROGRAM PENGELOLA AN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase pengelolaan perikanan budidaya(%)	1	68,38	794.458.121	69,12	856.737.351	69,85	858.196.071	70,59	865.681.950	71	3.375.073.493					

3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi daya (kelompok)	272	228	92.869.467	246	92.869.467	266	92.869.467	286	93.254.709	289	371.863.110						
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	272	228	92.869.467	246	92.869.467	266	92.869.467	286	93.254.709	289	371.863.110	Werangger e, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalema, Wewit, Lite, Waiwadan, Hurung Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawantaa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak , Pantai Besar, Lamawalan g, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapang, Lewobebe, Bandona, Lamanabi, Waibao, Lewobunga , Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Leraboleng, Tenawahan g, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan	Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalem a, Wewit, Lite, Waiwada n, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawanta a, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantar ak, Pantai Besar, Lamawal ang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolon g, Ile Padung, Painapan g, Lewobebe , Bandona, Lamanabi, Waibao, Lewobun ga, Bama, Blapena wa, Lewoklu ok, Konga, Bokang,	Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalem a, Wewit, Lite, Waiwada n, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawanta a, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantar ak, Pantai Besar, Lamawal ang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolon g, Ile Padung, Painapan g, Lewobebe , Bandona, Lamanabi, Waibao, Lewobun ga, Bama, Blapena wa, Lewoklu ok, Konga,	Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalem a, Wewit, Lite, Waiwada n, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawanta a, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantar ak, Pantai Besar, Lamawal ang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolon g, Ile Padung, Painapan g, Lewobebe , Bandona, Lamanabi, Waibao, Lewobun ga, Bama, Blapena wa, Lewoklu ok, Konga, Bokang,		Dinas Perikanan

																		Detun, Waiula, Kolilanang, Sagu (TAWAR) Sina Malaka (PAYAU) Pantai Besar, Lamawalan g, Waimana 1, WAimana 2, Wailolong, Ratulodong , Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelamaw angi, Neleleren, Duablolong , WAIwuring , Pledo, Tuagoe Tobi, Honihama, Oringbele, Duanur, Homa, Watanpao, Terong, Labelen, Watowara (LAUT)	Kobasom a, Dulijaya, Dintawa, Lerabole ng, Tenawah ang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanan g, Sagu (TAWA R) Sina Malaka (PAYAU) Pantai Besar, Lamawal ang, Waimana 1, WAiman a 2, Wailolon g, Ratulodo ng, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelama wangi, Neleleren ,Duablol ong, WAIwuri ng, Pledo, Tuagoe Tobi, Honiham a, Oringbel e,	Bokang, Kobasom a, Dulijaya, Dintawa, Lerabole ng, Tenawah ang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Ojan Detun, Waiula, Kolilanan g, Sagu (TAWA R) Adonara (PAYAU) Pantai Besar, Lamawal ang, Waimana 1, WAiman a 2, Wailolon g, Ratulodo ng, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelama wangi, Neleleren , Duablolo ng, WAIwuri ng, Pledo, Tuagoe Tobi, Honiham a, Oringbel	Kobasom a, Dulijaya, Dintawa, Lerabole ng, Tenawah ang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanan g, Sagu (TAWA R) Lewolaga (PAYAU) Pantai Besar, Lamawal ang, Waimana 1, WAiman a 2, Wailolon g, Ratulodo ng, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelama wangi, Neleleren , Duablolo ng, WAIwuri ng, Pledo, Tuagoe Tobi, Honiham a, Oringbel	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

																		Duanur, Homa, Watanpa o, Terong, Labelen, Watowar a (LAUT)	Oringbel e, Duanur, Homa, Watanpa o, Terong, Labelen, Watowar a (LAUT)	e, Duanur, Homa, Watanpa o, Terong, Labelen, Watowar a (LAUT)	
3	25	4	2. 04		Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan	Jumlah kelompok pengelolaan pembudidayaan ikan (kelompok)	272	228	701.588.654	246	763.867.884	266	765.326.604	286	772.427.241	269	3.003.210.383				Dinas Perikanan

3	25	4	2. 04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	272	228	633.484.380	246	695.110.124	266	695.110.124	286	697.993.589	269	2.721.698.216	Werangger e, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalema, Wewit, Lite, Waiwadan, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawantaa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak , Pantai Besar, Lamawalan g, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapang, Lewobele, Bandona, Lamanabi, Waibao, Lewobunga , Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Leraboleng, Tenawahang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanang, Sagu (TAWAR) Sina Malaka	Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalem a, Wewit, Lite, Waiwadana, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawantaa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak , Pantai Besar, Lamawalan g, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapan g, Lewobele ,Bandona ,Lamanabi, Waibao, Lewobunga, Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Leraboleng, Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Lerabole ng,	Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalema, a, Wewit, Lite, Waiwadana, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawantaa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak , Pantai Besar, Lamawalang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapan g, Lewobele , Bandona, Lamanabi, i, Waibao, Lewobunga, Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Lerabole	Weranggere, Horinara, Hinga, Oe Sayang, Nubalem a, Wewit, Lite, Waiwadana, Wure, Ile Pati, Nimun Danibao, Dawantaa, Saosina, Bloto, Kawela, Pandai, Mokantarak , Pantai Besar, Lamawalang, Sarotari Timur, PTW Bao, Wailolong, Ile Padung, Painapan g, Lewobele , Bandona, Lamanabi, i, Waibao, Lewobunga, Bama, Blapenawa, Lewokluok, Konga, Bokang, Kobasoma, Dulijaya, Dintawa, Lerabole	Dinas Perikanan
---	----	---	----------	---	---	--	-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	---------------	--	---	---	---	-----------------

																	(PAYAU) Pantai Besar, Lamawalan g, Waimana 1, Waimana 2, Wailolong, Ratulodong , Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelamaw angi. Neleleren, Duablolong , Waiwuring , Pledo, Tuagoe Tobi, Honihama, Oringbele, Duanur, Homa, Watanpao, Terong, Labelen, Watowara (LAUT)	Tenawah ang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanan g, Sagu (TAWA R) Sina Malaka (PAYAU) Pantai Besar, Lamawal ang, Waimana 1, Waiman a 2, Wailolon g, Ratulodo ng, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelama wangi, Neleleren ,Duablol ong, Waiwuri ng, Pledo, Tuagoe Tobi, Honiham a, Oringbel e, Duanur, Homa, Watanpa o, Terong, Labelen,	ng, Tenawah ang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanan g, Sagu (TAWA R) Adonara (PAYAU) Pantai Besar, Lamawal ang, Waimana 1, Waiman a 2, Wailolon g, Ratulodo ng, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelama wangi, Neleleren , Duablolo ng, Waiwuri ng, Pledo, Tuagoe Tobi, Honiham a, Oringbel e, Duanur, Homa, Watanpa o, Terong,	Tenawah ang, Dulipati, Boru, Boru Kedang, Hokeng Jaya, Hewa, Ojan Detun, Waiula, Kolilanan g, Sagu (TAWA R) Lewolaga (PAYAU) Pantai Besar, Lamawal ang, Waimana 1, Waiman a 2, Wailolon g, Ratulodo ng, Bahinga, WAibao, Nobo, Gayak, Nelelama wangi, Neleleren , Duablolo ng, Waiwuri ng, Pledo, Tuagoe Tobi, Honiham a, Oringbel e, Duanur, Homa, Watanpa o, Terong,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

																		Watowar a (LAUT)	Terong, Labelen, Watowar a (LAUT)	Labelen, Watowar a (LAUT)		
3	25	4	2. 04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan(dokumen)	1	1	68.104.274	100,0 0%	68.757.760	1	70.216.480	1	74.433.652	4	281.512.167	Kabupaten Flores Timur	Kabupate n Flores Timur	Kabupate n Flores Timur	Kabupate n Flores Timur	Dinas Perikanan
3	25	5			PROGRAM PENGAWASA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan(%)	54,74 % (75/137)	58,39	177.690.246	62,04	178.411.594	66	179.141.130	69,34	179.884.200	69,34	715.127.170					Dinas Perikanan

3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Sunber Daya perikanan (dokumen)	1	1	177.690.246	1	178.411.594	1	179.141.130	1	179.884.200	4	715.127.170					
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	177.690.246	1	178.411.594	1	179.141.130	1	179.884.200	4	715.127.170	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Dinas Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan	0	0,43	897.047.925	0,76	898.659.775	1,09	900.289.918	1,42	951.950.406	0,01142	3.647.948.024	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Dinas Perikanan
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penerbitan tanda Daftar usaha Pengelola Hasil perikanan (dokumen)	1	1	60.000.000	1	61.611.850	1	59.002.839	1	59.247.595	4	239.862.284					Dinas Perikanan
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota(dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	1	60.000.000	1	61.611.850	1	59.002.839	1	59.247.595	4	239.862.284	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Kab. Flores timur	Dinas Perikanan

3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengelolaan dan Pemasaran hasil perikanan (Kelompok)	60	70	67.483.037	85	67.483.037	105	67.483.037	130	67.762.971	130	270.212.083					Dinas Perikanan
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko(kelompok)	60 kelompok	70	67.483.037	85	67.483.037	105	67.483.037	130	67.762.971	130	270.212.083	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelamawangi (1), Neleleren (1), Duablolong (1)	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Moton wutun (1), Labelen (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelama wangi (1), Neleleren (1), Duablolo ng (1), Bahinga (1), Waibao (1), Watowar a (1), Duanur (1), Homa (1), Watowar a (1), Homa (1), Watowar a (1)	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Moton wutun (1), Labelen (1), Lohayong 1 (1), Lohayong (1), Ratulodong (1), Tiwatobi (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelama wangi (1), Neleleren (1), Duablolo ng (1), Bahinga (1), Waibao (1), Watowar a (1), Duanur (1), Homa (1), Watowar a (1), Waiwuring (1), Pledo (1),	Dinas Perikanan	

																				Tuagoeto bi (1), Honiham a (1), Oringbel e (1)		
3	25	6	2. 03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah Pelaku Usaha Perikanan (Kelompok)	70	80	769.564.888	95	769.564.888	115	773.804.042	140	824.939.839	140	3.137.873.657				Dinas Perikanan	
3	25	6	2. 03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	70	80	769.564.888	95	769.564.888		773.804.042	140	824.939.839	140	3.137.873.657	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Moton wutun (1), Labelen (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelamaw angi (1), Neleleren (1), Duablolong (1)	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Moton wutun (1), Labelen (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelama wangi (1), Neleleren (1), Duablolo ng (1), Bahinga (1), Waibao (1), Watowar a (1)	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waiburak (1), Sagu (1), Adonara (1), Moton wutun (1), Labelen (1), Lohayon g 1 (1), Lohayon g (1), Ratulodo ng (1), Tiwatobi (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelama wangi (1), Neleleren (1), Duablolo ng (1), Bahinga (1), Waibao (1), Watowar a (1), Duanur (1), Homa (1), Watowar	Sagu (1), Adonara (1), Moton wutun (1), Labelen (1), Lohayon g 1 (1), Lohayon g (1), Ratulodo ng (1), Tiwatobi (1), Nobo (1), Gayak (1), Nelelama wangi (1), Neleleren (1), Duablolo ng (1), Bahinga (1), Waibao (1), Watowar a (1), Duanur (1), Homa (1), Watowar	Dinas Perikanan

																				(1), Watowar a (1)	a (1), Pantai Besar (1), Waiwuri ng (1), Pledo (1), Tuagoeto bi (1), Honiham a (1), Oringbel e (1)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---	--

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026, sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
	2021	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan (perikanan)	1,45	1,85	2,35	2,85	3,35
Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (perikanan)	0,33	1,25	1,75	2,15	2,95

Selain untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah daerah di atas, Dinas Perikanan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengemban tugas dan fungsi dalam urusan pilihan bidang urusan kelautan dan perikanan, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja Bidang Urusan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	Kelautan dan Perikanan						
1.1	Produksi Perikanan	101,84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	37,42 %	38,19 %	38,96 %	39,37 %	40,5 %	40,5 %
1.3	Konsumsi ikan	0 % (61 kg/kapita)	100 % (62 kg/kapita)	100 % (63 kg/kapita)	100 % (64 kg/kapita)	100 % (65 kg/kapita)	100 % (65 kg/kapita)
1.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	98 % (15.894/16125)	98%	98%	98%	98%	98%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, memuat antara lain tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Perikanan merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Perikanan sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Dinas Perikanan).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman dalam penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun dalam evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur.

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Flores Timur,

Antonius Lohi Raya, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

2022